

Tim Penulis:

**Dina Suryawati, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar,
Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Aman, Amtai Alaslan, Sulaiman,
Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, Ichwani Siti Utami,
Marini Sari Dewi Seger.**



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

**Editor:
Ichwani Siti Utami**



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Tim Penulis:

**Dina Suryawati, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar,
Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaslan, Sulaiman,
Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, Ichwani Siti Utami,
Marini Sari Dewi Seger.**



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Tim Penulis:

**Dina Suryawati, Suanto, Anny Riwayat, Abul Haris Suryo Negoro, Siti Hajar,
Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaslan, Sulaiman,
Mohamad Djasuli, Syahrabudin Husein Enala, Ichwani Siti Utami,
Marini Sari Dewi Seger.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Ichwani Siti Utami

ISBN:

978-623-500-812-7

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ini yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah. Buku ini disusun sebagai referensi yang membahas berbagai aspek dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari landasan hukum, struktur organisasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Buku ini menguraikan secara sistematis berbagai elemen penting dalam pemerintahan daerah, termasuk Konsep Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, serta Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, pembahasan mengenai Pelayanan Publik di Daerah, Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, serta Etika dan Transparansi dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk data, penelitian, maupun masukan yang sangat berharga. Tanpa dukungan dan kerja sama berbagai pihak, buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai sistem pemerintahan daerah. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang luas dan menjadi inspirasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Maret, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Konteks Historis dan Teoritis Sistem Pemerintahan Daerah.....	3
C. Ruang Lingkup Sistem Pemerintahan Daerah	5
D. Rangkuman Materi	15
BAB 2 LANDASAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	19
A. Pendahuluan.....	20
B. Dasar Konstitusional Pemerintahan Daerah	21
C. Undang-Undang Pemerintahan Daerah	25
D. Hierarki Peraturan Daerah.....	35
E. Rangkuman Materi	36
BAB 3 STRUKTUR DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH.....	43
A. Pendahuluan.....	44
B. Demokrasi Indonesia	46
C. Desentralisasi.....	49
D. Tata pemerintahan Daerah	51
E. Rangkuman Materi	56
BAB 4 KONSEP OTONOMI DAERAH.....	61
A. Pendahuluan.....	62
B. Konsep Otonomi Daerah	63
C. Desain Otonomi Daerah di Indonesia.....	68
D. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kebijakan	71
E. Pengaruh Kepemimpinan di Era Otonomi Daerah	74
F. Rangkuman Materi	77
BAB 5 KEUANGAN DAERAH	83
A. Pendahuluan.....	84
B. Konsep Keuangan Daerah.....	85
C. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	90
D. Tantangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	101
E. Rangkuman Materi	106

BAB 6 KEUANGAN DAERAH:**PRINSIP, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN.....111**

- A. Pendahuluan..... 112
- B. Prinsip Keuangan Daerah 113
- C. Pengelolaan Keuangan Daerah..... 121
- D. Pengembangan Keuangan Daerah 130
- E. Strategi Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah 139
- F. Rangkuman Materi 147

BAB 7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH151

- A. Pendahuluan..... 152
- B. Landasan Teoritis dan Konseptual..... 153
- C. Proses dan Tahapan Perencanaan..... 159
- D. Rangkuman Materi 168

BAB 8 PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH177

- A. Pendahuluan..... 178
- B. Paradigma Pelayanan Publik 179
- C. Manajemen Pelayanan Publik 184
- D. Penerapan Prinsip Pelayanan Publik 185
- E. Inovasi Pelayanan Publik 186
- F. Rangkuman Materi 188

BAB 9 HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT193

- A. Pendahuluan..... 194
- B. Pengertian Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat 194
- C. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat..... 195
- D. Landasan Hukum Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat 198
- E. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Daerah 200
- F. Rangkuman Materi 203

BAB 10 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS**PEMERINTAHAN DAERAH.....207**

- A. Pendahuluan..... 208
- B. Definisi Pengawasan 209
- C. Pengawasan Pemerintahan Daerah 211

D. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	218
E. Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	221
F. Rangkuman Materi	223
BAB 11 KONFLIK DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN DAERAH	229
A. Pendahuluan	230
B. Pengertian Konflik Dalam Pemerintahan Daerah	231
C. Jenis-Jenis Konflik Dalam Pemerintahan Daerah	234
D. Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemerintahan Daerah	237
E. Pengaruh Konflik Terhadap Pengelolaan Pemerintahan Daerah	242
F. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Menghadapi Konflik	246
G. Rangkuman Materi	250
BAB 12 SISTEM PEMERINTAHAN DESA	255
A. Pendahuluan	256
B. Desa dan Pemerintahan Desa	257
C. Dasar Hukum Pemerintahan Desa	260
D. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Desa	263
E. Penyelenggara Pemerintahan Desa	264
F. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa	269
G. Keuangan Desa	271
H. Rangkuman Materi	274
BAB 13 ETIKA DAN TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH	277
A. Pendahuluan	278
B. Etika Pelayanan Publik	279
C. Transparansi dan Mekanisme Kontrol	281
D. Keterbukaan Informasi Publik Mewujudkan Kontrol Publik	284
E. Etika dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	286
A. Rangkuman Materi	290
GLOSARIUM	295
PROFIL PENULIS	306



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 1: PENGANTAR SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP.

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Jember

BAB 1

PENGANTAR SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Melalui penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada entitas pemerintahan di tingkat local (provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan) sehingga tercipta mekanisme pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat (Cheema & Rondinelli, 2007). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus memberikan ruang bagi inovasi daerah dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di setiap wilayah.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, sejalan dengan perkembangan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tuntutan reformasi, terutama setelah era Orde Baru, melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan publik secara mandiri (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kerangka akuntabilitas dan transparansi yang kuat agar pengelolaan sumber daya di daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas (Kurnia, 2016).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta pengelolaan keuangan daerah yang profesional menjadi pilar penting dalam mewujudkan prinsip-

DAFTAR PUSTAKA

- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press.
- Krane, D., Rigos, P. N., & Hill, M. B. (Eds.). (2001). *Home Rule in America: A Fifty-State Handbook*. CQ Press.
- Kurnia, R. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuhlmann, S., & Wollmann, H. (2019). *Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe*. Edward Elgar Publishing.
- Kurnia, R. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Page, E. C., & Goldsmith, M. (Eds.). (1987). *Central and Local Government Relations: A Comparative Analysis of West European Unitary States*. Sage Publications.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (Eds.). (1983). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. The World Bank.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Allen & Unwin.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 2: LANDASAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Suanto, S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang

BAB 2

LANDASAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta amendemennya. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prinsip ini memastikan bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan cermin dari implementasi prinsip otonomi dan desentralisasi yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sistem ini telah direkayasa untuk memberikan setiap daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, sehingga setiap wilayah dapat mengoptimalkan potensi lokalnya. Data administratif menunjukkan bahwa per tahun 2023 terdapat 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, menandakan betapa luasnya penerapan sistem otonomi di seluruh nusantara (Kompas, 2023).

Transformasi pemerintahan daerah telah mengalami perubahan signifikan sejak masa Orde Baru, ketika sentralisasi menjadi ciri dominan pemerintahan. Reformasi 1998 membuka babak baru dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 282–300. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.282-300>
- Arifin, F. (2024). KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 670–684. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.10213>
- Ayu, P. K. P., Sudarsono, & Qurbani, I. D. (2023). THE AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENTS REGARDING THE MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY IN LAW NUMBER 23 OF 2014 ON REGIONAL GOVERNMENT. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(4), 1154–1164. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i4.931>
- Dadang, S. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3, 271–288.
- Elcaputera, A. (2022). URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 121. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i1.8236>
- Febriandiela, F., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Critical Analysis of Decentralization Theory in the Context of Local Government: A Literature Review. *Adabi : Journal of Public Administration and Business*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.62066/jpab.v11i1.13>
- Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 833–853. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.566>

- Hadji, K., Firdaus, M. R., Haikal, M. W., Prianggoro, V. W. A., Dwitanaya, N. D., & Pamungkas, A. I. P. (2024). Peran Legislator Dalam Perubahan Peraturan Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 37–41. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.269>
- Hakam Bath, A. S. (2024). Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 129–144. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7056>
- Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3588>
- Ikhwan, Y. N., & Khairani, K. (2024). Kerangka Hukum Harmonisasi Peraturan Daerah Dalam Perspektif Teori Hirarki Perundang-Undangan. *Nagari Law Review*, 7(2), 401. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.401-419.2023>
- Kompas, K. C. (2023, August 10). *Pembagian Wilayah Administratif Indonesia*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/08/10/223959178/pembagian-wilayah-administratif-indonesia>
- Marikar, Moh. F. (2023). Harmonizing the National Legal System Through the Formation of Ideal Legislation. *JURNAL LEGALITAS*, 16(2), 167–178. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.19941>
- Mendy, O. (2024). Regional Autonomy in Indonesia after the Second Constitutional Amendment: Assessing its Developmental Delivery. *Constitutionale*, 5(1), 39–52. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3279>
- Muhtadin, M. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *AHKAM*, 2(2), 233–251. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1029>
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P. A., & Syahrin Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional

- Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(09), 431–439.
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Rahmatiar, Y. (2024). Legal Protection and Rights of Indigenous Peoples: Legal Certainty in Managing Natural Resources. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3).
<https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.4999>
- Reba, Y. E. (2024). Decentralization of Power: Opportunities and Challenges for Regions. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(10), 2464–2476.
<https://doi.org/10.59613/global.v2i10.344>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Sari, D. N., Chandia, E. A., Maulida, M., F.W, N. A., Putra, A. A., & Pranata, A. A. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(4), 166–172.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.567>
- Sufianto, D. (2020). PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288.
<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Wirahayu, C. P., & Mursyidah, L. (2023). Improving Local Community Public Services: Revealing Hurdles and Strategic Remedies. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 23.
<https://doi.org/10.21070/ijppr.v23i0.1318>



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 3: STRUKTUR DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Anny Riwayati, S.E., M.Si.

Universitas Tanjungpura Kota Pontianak Kalimantan Barat

BAB 3

STRUKTUR DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia yaitu pada saat tahun 1999. Tahun tersebutlah Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan berdasarkan desentralisasi (Taha, 2009). Adanya tata aturan Pemerintahan ke arah yang lebih baik dari sentralisasi ke desentralisasi. Hadirnya sistem desentralisasi maka berlaku pelaksanaan daerah secara otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merancang organisasinya sendiri berdasarkan mana yang mejadi urusan wajib daerah atau pilihan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 120 bahwa kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Tujuan adanya kelembagaan pemerintah daerah agar birokrasi menjadi efektif dalam melakukan pelayanan serta bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang berada di wilayahnya (Ade Putra Ode Amane et al., 2024). Negara Indonesia terdiri dari 38 Provinsi berdasarkan data BPS per tahun 2024, jumlah yang cukup besar. Pemerintah pusat dan daerah memiliki keterkaitan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur urusan daerah nya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun memiliki kebebasan, daerah masih berkoordinasi ke pusat karena tetap terhubung sebagai NKRI (Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra Ode Amame, Riwayati, A., Amien, M. Z., Canaldhy, R. S., Nirmala, I., Suryana, K. D., Rahmi, K., Firdaus, Baharuddin, Subiyakto, R., Jusniaty, Charin, R. O. P., & Yuliana. (2024). *Pemerintahan Daerah*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Andhika, L. R. (2017). Pathology Bureaucracy: Reality of the Indonesian Bureaucracy and Prevention. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 101–114. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.101-114>
- Aulia, S. S., Salsabila, & Pitakon, F. A. (2023). Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1044–1052.
- Busra, A., & Fitriyadi, M. (2024). Manajemen Pendidikan Politik Khalifah Usman Bin Affan. *DIDAKTIK: Journal of Educational ...*, 1(2), 51–59. <http://jurnal.academics.web.id/index.php/dtk/article/view/9>
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Moderat*, 7(1), 1–9.
- Gunawan, H. (2005). Desentralisasi Ancaman Dan Harapan Bagi Masyarakat Adat. In *Center for International Forestry Research*.
- Hasrul, M., & Pradana, S. A. (2019). Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Amanna Gappa*, 27(1), 23–28.
- Ismail, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Erlangga.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Prasetyo, S. A., & Etwinia, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah dalam Penguatan Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan di Indonesia. *Masterpiece : Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(4), 175–185. <https://doi.org/10.62083/zhly67s73>
- Purwadhi, & Yadiman. (2020). *Teori Organisasi*. PT Refika Aditama.

- Setiyono, B. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. PT Buku Seru.
- Setyasih, E. T. (2023). Creating an Effective Bureaucracy by Reducing Bureaucratic Pathology in Local Governments. *Influence: International Journal of Science Review*, 5(1), 137–143. <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i1.112>
- Taha, R. (2009). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 39–62.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 4: KONSEP OTONOMI DAERAH

Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si.

FISIP Universitas Jember

BAB 4

KONSEP OTONOMI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, sumberdaya manusia dan alam yang berlimpah menjadi potensi dan peluang peningkatan ekonomi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan, merupakan strategi menjawab masalah-masalah lokal serta strategi merespon tuntutan global. Merujuk dari UU No 22 tahun 1999 sampai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Desentralisasi menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelimpahan kewenangan dari Pusat ke daerah memberikan daerah kesempatan mengembangkan potensi lokal menjadi lebih baik. Substansi dari otonomi daerah berkaitan dengan tiga isu besar dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah yakni pembagian kekuasaan dan kewenangan, pembagian pendapatan yang merata, dan kemandirian tata kelola administrasi pemerintahan daerah (Azhari, 2019). Latar belakang otonomi daerah dan desentralisasi menjadi penting untuk diketahui khalayak. Desentralisasi menjadi penting untuk diimplementasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan daerah seperti kebijakan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan potensi pengembangan daerah sesuai budaya lokal.

Isu dan kebijakan pemerintah daerah menjadi permasalahan yang kompleks dimulai koordinasi antar daerah yang tidak terbentuk, ego sektoral antarorganisasi pemerintahan, ketimpangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan lambat. Dari segi ketatanegaraan, pemerintahan daerah merupakan aspek struktural dari suatu negara kesatuan menggunakan desentralisasi sebagai asas pemerintahan daerah, berimplikasi distribusi kewenangan dari Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Abdul Kholiq dan Abul Haris Suryo Negoro, (2019). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang: Intrans Publishing
- Azhari, Abdul Kholiq dan Abul Haris Suryo Negoro, (2021). Kepemimpinan Kepala Daerah: Pasca Pilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah. Intrans Publishing, Malang
- Bowman, Ann O, Richard C, Scavo Carmine. (2021). State and Local Government, Cengage Learning
- Coen J.G. Holtzappel and Martin Ramstedt (editor). (2009). Decentralization and regional autonomy in Indonesia: implementation and challenges, ISEAS Publishing
- Cheema, G. Shabbir, Dennis A. Rondinelli, (ed). (2007), Decentralizing Governance: Emerging Concepts And Practices, Brookings Institution Press, Washington
- Deem, Jacob. (2023). Rethinking Decentralization Mapping the Meaning of Subsidiarity in Federal Political Culture, McGill-Queen's University Press
- Grindle, Merilee S., (2007), Going Local: Decentralization, Democratization, And The Promise Of Good Governance, Princeton University Press, New Jersey
- Hersey, Paul & Kenneth H. Blanchard. (1994)
. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Ditj oleh Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Holzhaecker, Ronald L. Rafael Wittek, Johan Woltjer (Ed). (2016). Decentralization and Governance in Indonesia, Springer International Publishing Switzerland
- Ignacio Lago (Ed). (2021). Handbook On Decentralization, Devolution And The State, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham
- Karim, Abdul Gaffar, (Ed). (2003). Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Morphet, Janice. (2008). Modern Local Government, SAGE Publications

- Mardiasmo. (2002). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Negoro, Abul Haris Suryo, Muhlisin, N Masyithoh, M Kusumah and A Trihartono, (2019). Maritime policies in the era of regional autonomy: identifying the challenges, OP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 485. DOI 10.1088/1755-1315/485/1/012030
- Nugroho, Riant. (2024) Public Policy for the Developing Countries, Pustaka Pelajar Institute for Policy Reform
- Rondinelli, Dennis A. and John M. Heffron (Ed). (2007), Globalization and change in Asia, Lynne Rienner Publishers, London
- Salam, Dharma Setiawan. (2002). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Djambatan, Jakarta
- Sarundajang, S.H., (2005). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Kata Hasta Pustaka. Jakarta
- Shinichi Ichimura, Roy Bahl, (2008), Decentralization Policies In Asian Development, World Scientific Publishing, Singapore
- Soenarko SD. (2000). *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press. Surabaya
- Sutiyo. Keshav Lall Maharjan. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia, Springer Nature Singapore
- Sukarna. (1989). Kepemimpinan dalam Administrasi. Mandar Maju. Bandung:
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara. Jakarta



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 5: KEUANGAN DAERAH

Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

BAB 5

KEUANGAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Materi ini membahas tentang keuangan daerah, sebagai salah satu elemen krusial dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keuangan daerah mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk membiayai berbagai program serta layanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Pendapatan daerah yaitu sumber pemasukan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat
2. Belanja daerah yaitu pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial.
3. Pengelolaan anggaran yaitu proses penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran daerah yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja serta mencegah penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 mencapai Rp 814,72 triliun. Adapun rincian alokasi per daerah secara resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023 yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan

DAFTAR PUSTAKA

- Debora., Kantohe, Meidy., Tarore, Steven., & Rantung, Margareth (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administratio: Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara, Volume 5 No. 2 (2023) <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8339>
- Dewi, Gita Apsari & Wulandari, Anak Agung Ayu Intan. (2023) Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 8 No. 2 (2023) <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.4619>
- Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Daerah: Pendekatan Teoretis dan Praktis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariyanto (2020) Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Volume 3 Issue 2 (2020) <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Khusaini, Moh (2018) Keuangan Daerah. Malang: UB Press
- Kurniawan, A. (2019). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2020) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
- Martira, Amelia & Nursadi, Harsanto (2020) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50 No. 1 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no.1.2490>
- Meinarsari, Alit Ayu & Nurhadi, Harsanto (2022) Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi. Jurnal of Syntax Literate, Volume 7 Issue 8 (2022) <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8>
- Rakhmat, S. (2018). "Desentralisasi dan Otonomi Daerah" . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Ramadhani, Fahmi Ali., et al (2025) Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Volume 7 No. 1 (2025) <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3966>
- Sulistiawan, Anggit., Ispriyarso, Budi & Ristyawati, Aprista. (2019) Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 No. 2 Edisi Mei (2019) <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 6: KEUANGAN DAERAH: PRINSIP, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H.

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

BAB 6

KEUANGAN DAERAH: PRINSIP, PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat otonomi daerah. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.

Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin berkembang, terutama melalui penerapan teknologi informasi seperti *e-Budgeting* dan *e-Monitoring*. Teknologi ini telah membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan. Beberapa daerah yang telah menerapkan sistem ini melaporkan penurunan kebocoran hingga 20 persen dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini kerap menghambat inovasi fiskal di tingkat lokal. Oleh sebab itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Dalam menghadapi dinamika global seperti pandemi COVID-19 kala itu, yang berdampak besar pada stabilitas keuangan daerah, langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi pendapatan, dan kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting. Dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Pariwisata Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2019). Laporan Tahunan 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bappenas. (2018). Laporan Ekonomi Daerah 2018. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (2020). Panduan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan. (2019). Laporan Kinerja Keuangan 2019. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kementerian Keuangan.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). Fundamentals of Human Resource Management (7th ed.). McGraw-Hill.
- Prasetyo, A. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 25(2), 123-135.
- Sari, R. (2023). Kerja Sama Antar Daerah dalam Pengembangan Kawasan Industri. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 18(1), 45-59.
- Suharto, B. (2020). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui E-Tax. Jurnal Perpajakan, 15(3), 201-215.
- Yusuf, M. (2022). Potensi Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Daerah. Jurnal Pariwisata, 10(4), 78-89.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 7: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 7

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Regulasi tersebut mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, (Guampe et al., 2022); (Hasan et al., 2023).

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara bawah atas (*bottom-up*) serta atas-bawah (*top-Down*). Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurohim, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Almahdali, H., Josviranto, M., Siagian, A. A., Juliardi, B., Alfath, T. P., Putri, T. D., Ratuanak, A. M. D., Abas, M., Yudhanti, R., Hazmi, R. M., Prakasa, R. S., & Amane, A. P. O. (2023). *Ilmu Negara* (T. Artanto (ed.); Pertama). Gita Lentera.
- Almahdali, H., Rijal, Zulfachry, Amane, A. P. O., Seran, D. A. N., Luturmas, Y., Mardiana, Syafaruddin, & Saguni, D. S. (2023). *DASAR–DASAR ADMINISTRASI* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Get Press Indonesia.
- Amane, A. P. O., Anggreyni, M., Wardhana, A., Mahdar, Bagenda, C., Trimurti, C. P., Ciptagustia, A., Fadilah, N. N., Awa, Mua, E. L., Santi, A., & Muhlis. (2024). *Kajian Kepemimpinan Dalam Organisasi* (H. F. Ningrum (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., Rahmawati, A., Rusdiyana, E., Utama, J. Y., Sutrisno, E., Sekarsari, R. W., Andari, S., Afandi, A. H., Santosa, & Lailin, M. I. A. H. (2023). *Pembangunan Desa* (S. Fatimah (ed.); Pertama). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Purwanto, R., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Perspektif bidang ilmu Sosial)* (Efitra & Sepriano (ed.); Pertama). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O., Lubis, S., Subagiyo, A., Malawat, S. H., Mukrimah, Takdir, M., Nirmala, I., Gunawan, R., Bajuri, D., Yuliana, Fahrudin, A., Jabbar,

- A., Nirmala, I., Samin, R., Wiguna, A., Nopralia, S., Waliah, S., & Canaldhy, R. S. (2024). *Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik: Strategi dan Tantangan* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). CV. Media Sains Indonesia.
- Amane, A. P. O., Mukhtar, A., Kapitaraw, B., Kholisya, U., Fatayan, A., Yanuarita, H. A., Karyono, Astawa, I. P., Suhardi, D., Astutik, W. S., Kurniawan, H., Azmi, Widyanti, R. H. D., Sanasintani, & Sambuardi, R. (2024). Kepemimpinan Di Indonesia. In A. Asari (Ed.), *PT Mafy Media Literasi Indonesia* (Pertama).
- Amane, A. P. O., Rahmawati, A., Juwita, M. N., Karyasa, T. B., Hendrayady, A., Malik, Andriyani, D., Padmasari, Y. A. L., Lestari, A., Surjanto, Iskandar, A., Jabbar, A., Badruddin, S., & Heryani, A. (2023). Reformasi Administrasi Publik. In A. Hendrayady (Ed.), *CV. Eureka Media Aksara* (Pertama).
- Amane, A. P. O., Sihombing, R. S. M., Santoso, I., Riwayati, A., Judijanto, L., Warih, W. C., Hudaeni, N., Rifani, D. N., Mastur, A. S. R., Wati, I. K., & Tando, C. E. (2024). *Dinamika Administrasi Publik* (A. Riwayati (ed.); Pertama). CV. Mitra Mandiri Persada.
- Amane, A. P. O., Zaman, W., Matorang, H. D., Jayalangi, L. O. S., & Haq, A. (2023). *BUKU AJAR DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (S. A. Laali (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Ausat, A. M. A., Setyasari, U. E., Aman, A. P. O., Mian, A. S., Nurbaeti, E., Gadzali, S. S., Azzaakiyyah, H. K., Irwanto, A. S., Harto, B., & Mulyanto, M. F. (2023). *INOVASI: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif* (A. M. A. Ausat (ed.); Pertama). CV. AYRADA MANDIRI.
- Baharuddin, Santoso, A., Muliani, Aman, A. P. O., Samudra, A., Firdaus, Lamidi, Heryani, A., Iskandar, A., Ramdani, A., & Kurnianingsih, F. (2023). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Penerapannya)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.
- Bormasa, M. F., Sakir, A. R., Mustanir, A., Yunus, N. R., Aman, A. P. O., Nengsih, N. S., Alaslan, A., & Sunariyanto. (2023). *BIROKRASI INDONESIA* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Fadli, Z., Mulyati, Austin, T., Lasmiatun, K., Rukmana, A. Y., Aman, A. P. O., Choerudin, A., Normansyah, Herdiansyah, D., Yanto, R., &

- Sukarman. (2023). *DASAR-DASAR MANAJEMEN PUBLIK* (Ariyanto (ed.); Pertama). Get Press Indonesia.
- Fadli, Z., Ningsih, Y., Januardani, F. D., Zulkifli, Helencia, K., Maghfirah, N., Amane, A. P. O., Famawati, Jaenam, Yandri, L. I., & Arman, Z. (2024). *Manajemen Sumber Daya Aparatur* (E. Salim (ed.); Pertama). Gita Lentera.
- Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vehtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., Baraja, A., Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fardiansyah, H., Amane, A. P. O., Sinaga, D. S., Lestyowati, J., Anggraini, R. I., Kutoyo, S., Manggabarani, F. M. & A. S., Utami, D. A., Ramadhani, I., Ahdiyat, M., Luturmas, Y., & Halik, P. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, Akbar, M., Sinurat, J., Hidayah, D. D., Nababan, D. S., & Abidin, Z. (2022). *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Handayani, D. N., Syamel, S. S., Mappiwali, H., Zulhakim, A. A., Amane, A. P. O., Agussalim, A., Yogopriyatno, J., & Kornawan, R. (2024). *Kebijakan Publik: Dari Teori Ke Praktik* (D. N. Handayani (ed.); Pertama). CV. Ayrada Mandiri.
- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

- Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Luturmas, Y., Bormasa, M. F., Alaslan, A., Amane, A. P. O., Zulfachry, Sunariyanto, Katili, A. Y., & Ardiputra, S. (2023). *Sistem Administrasi Negara* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Get Press Indonesia.
- Mansyur, A. I., Fitriani, Widyaputra, P. K., Amane, A. P. O., Abidin, Z., Parahita, B. N., Hilman, Y. A., Rais, N. R. & A., Sinurat, J., Rianto, Ahmadin, & Ghufonudin. (2023). *SOSIOLOGI PERKOTAAN* (E. Damayant (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Mardhatillah, M., Mastur, A. S. R., Firlana, H., Paselle, E., Pangestuti, N., Warih, W. C., Rohayati, A. C., Santoso, I., S, A., Indahdewi, L., Simanjuntak, M. V., Arnanda, R., & Amane, A. P. O. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (R. Persada (ed.); Pertama). CV. Gita Lentera.
- Munir, F., Nursetiawan, I., Cahyaningrum, Y., Oppier, H., Suardi, S., Riwayati, A., Amane, A. P. O., Wahira, Wicaksono, F., & Tahir, M. I. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL* (A. Riwayati (ed.); Pertama). Karsa Cendekia.
- Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Suryaningrum, D. H., Sunariyanto, Haipon, H., Nursetiawan, I., Amane, A. P. O., Kamil, I., Abdurohim, & Yatno, T. (2023). *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. In A. Asari (Ed.), *Mafy Media Literasi Indonesia* (Pertama).
- Mustanir, A., Salampey, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasiyus Tobondo, Pontoan, K. A., Bagenda, C., Ismail, N., Buyamin, Liza, A. W., Nofianti, L., Amane, A. P. O., Pramazuly, A. N., Wiryanto, W., Sahi, N. A., Lutfi, M., & Prastya, I. Y. (2023). *BIROKRASI INDONESIA* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Qoiri, M. N., Iftitah, A., Suhariyanto, D., Amane, A. P. O., Muhtar, M. H., Sacipto, R., Sidik, A. D. W. M., Runtunuwu, Y. B., Abdurohim, Abas,

- M., & Citranu. (2023). HUKUM PEMERINTAHAN DESA. In D. P. Sari (Ed.), *Get Press Indonesia* (Pertama).
- Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U., Abdurohim, Amame, A. P. O., Alaslan, A., Fahrizal, M., Prestoroika, E., Awaluddin, M., Putri, T. D., & Siallagan, D. Y. (2023). KEBIJAKAN PUBLIK. In Ukas (Ed.), CV. *Gita Lentera* (Pertama).
- Subagiyo, A., Amame, A. P. O., Nilawati, E., Utami, R. T., Subiyakto, R., Ningtyas, T., Halim, P., Suryono, W., Heryani, A., Hwihanus, & Jabbar, A. (2023). *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (Suatu Pengantar)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 1 (2004).
- Yahya, A. S., Anggapurana, B., Purwanto, E., Amame, A. P. O., Maulida, E. K., Nursamsir, Jamaluddin, I. I., Nasrullah, Mas'odi, Hermawanto, & Musleh, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Mawardi (ed.); Pertama). PT. Mafi Media Literasi Indonesia.
- Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amame, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 8: PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Amtai Alaslan, S.IP., M.Si.

Universitas Lelemuku Saumlaki

BAB 8

PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

A. PENDAHULUAN

Mirisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melakukan pelayanan publik merupakan hal umum yang dirasakan oleh setiap warga negara, dimana secara defacto para penguasa di daerah sering menggunakan sektor-sektor pelayanan publik untuk mempertahankan kekuasaannya. Adapun penyelenggara pelayanan publik tidak mempertahankan profesionalitasnya sebagai orang yang bertugas untuk melayani masyarakat sehingga mencederai prinsip-prinsip dasar manajemen pelayanan public seperti efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena adanya kecenderungan prioritas terhadap kekuasaan sangatlah tinggi sehingga membuat pelayanan publik semakin jauh dari misinya untuk melengkapi lini pemerintahan negara kita dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah menjadi begitu sentral seiring dengan status otonomi yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan semua sumber daya dan keuangan yang ada dapat dimobilisasikan untuk meningkatkan pembangunan yang dikomandokan langsung oleh pemerintah. Tugas pembangunan itu hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah/Negara melalui berbagai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh birokrasi. Kondisi ini membuat birokrasi selalu memiliki peran yang sangat kuat, pendekatan kekuasaan lebih diutamakan dari pada memberikan pelayanan publik dengan sistem dan mekanisme kerja yang cenderung bersifat *top-down* ketimbang *bottom-up*. Dari sini maka masyarakat akan semakin di atur dan pilihannya akan ditentukan oleh pemerintah sehingga kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat lebih bersifat berat sebelah atau tidak seimbang. Publik akan selalu memiliki anggapan bahwa kekuasaan birokrasi sangat besar dan

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anggriani. 2016. *PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alaslan, Amtai. 2008. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Skripsi STPMD "APMD"
- Bormasa, M. F., Amame, A. P. O., Mustanir, A., Yunus, N. R., Amame, A. P. O., Nengsih, N. S., & Alaslan, A. (2023). *Birokrasi Indonesia*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Abdurrohman, A., Sunariyanto dkk. 2023. *Manajemen Sektor Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2017 *Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Widina
- Kaloh, J. 2010. *KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH, Pola Kegiatan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad. 2018. *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Lhokseumawe. UNIMAL PRESS
- Niode Idris Yanto. 2014 *Entrepreneurial Government*. Gorontalo. UNG Press.
- Osborne David dan Plastrik. 2003. *Mewirusaha Birokrasi. (Mentransformasikan Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik)*. Jakarta. PPM
- Osborne David dan Plastrik Peter. 2001. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta. PPM
- Sinambela, Lijian Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara

Simamora, Hendry. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN

Yudi Rusfina dan Cahya Supriatna. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangannya*. Bandung: Alfabeta



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 9: HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.

Universitas Borneo Tarakan

BAB 9

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks otonomi daerah, interaksi ini tidak hanya mencerminkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi, tetapi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendengarkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, kebijakan, serta layanan publik. Hubungan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, hingga konflik kepentingan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. PENGERTIAN HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT

Hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dapat diartikan sebagai interaksi yang terjalin antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal dengan masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek dan objek dari pelayanan publik serta pembangunan daerah. Hubungan ini didasarkan pada prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawati Hamid. 2020. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Makassar, Garis Khatulistiwa.
- Mansyur Achmad & Muhammad Baharuddin Zubakhrum, 2024. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jombang, Jawa Timur, Askara Sastra.
- Ni'matul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia.
- Rudy, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung, Indepth Publishin.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*, bagian Ketiga, Bandung: Mandar Maju.
- Wirazilmustaan,Dkk, 2018. Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas, Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.2/ Desember 2018.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 10: PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT.

Universitas Trunojoyo Madura

BAB 10

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan dan akuntabilitas menjadi elemen yang berperan penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan kepada publik. Adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan ekonomi daerah dapat menimbulkan perbedaan laju cepat pembangunan dalam suatu daerah yang menjadikan pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah semakin krusial. Pengawasan berfungsi sebagai alat untuk memantau serta mengevaluasi seluruh kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengawasan pemerintah daerah dapat melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta masyarakat sipil. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Di era globalisasi ini, mudahnya akses informasi menyebabkan masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan tingginya tuntutan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan anggaran publik dan pengambilan kebijakan dalam pemberian layanan publik. Adanya kesadaran masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah untuk mengelola dana, membuat kebijakan, serta menyediakan layanan untuk publik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan serta tindakan yang telah diambil kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, P. (2006). *Administrasi dan Manajemen Umum Jilid 11*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aulia Sholichah, I. N. (2021). *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Djasuli, M. (2022). *Akuntansi Sektor Publik Pengantar Teori dan Konsep*. Bangkalan: Orang-orang Madura.
- Fifit Purnama, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 01-15.
- Indonesia. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Kertonegoro, S. (2004). *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Widya Press.
- Purnomo, K. D. (2023). Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Cargill Indonesia di Amurang Provinsi Sulawesi Utara. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 1, Nomor 1* , 249-255.
- Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Riana Mayasari, J. F. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Robbin. (2019). *Manajemen Sumber Ddaya Manusia*. Jakarta: PT Sinar Abadi.

- Siregar, F. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Publik UNDHAR MEDAN Volume 11, Nomor 2*, 40-50.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Indonesia: Bumi Aksara.
- Timpe, A. (2002). *Memotivasi Pegawai*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 11: KONFLIK DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN DAERAH

Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P.

Universitas Musamus

BAB 11

KONFLIK DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan fungsi otonomi daerah yang diberikan oleh negara. Konflik dan dinamika dalam pemerintahan daerah menjadi isu yang sangat penting karena dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik dalam negeri. Konflik ini sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak, baik itu antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antar daerah, atau bahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Konflik dalam konteks pemerintahan daerah bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama dalam hal pembagian kewenangan dan alokasi sumber daya. Dalam hal ini, desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun pada praktiknya, sering kali menimbulkan ketegangan yang berdampak pada pengelolaan wilayah dan pemerintahan.

Sebagai instruksi khusus dalam pembahasan materi ini, pembaca akan diajak untuk memahami penyebab-penyebab utama konflik yang terjadi dalam pemerintahan daerah, baik dari perspektif politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pembahasan ini juga akan mencakup dinamika hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya, analisis mengenai konflik antar daerah, seperti sengketa wilayah dan sumber daya alam, serta dampak dari konflik tersebut terhadap pembangunan dan kestabilan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2020). Penyelesaian konflik dalam pemerintahan daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. (2019). Manajemen konflik dalam pemerintahan daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barros, R., & Souza, F. (2018). The dynamics of local government conflict: A comparative approach. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 435-450.
- Boediono, B. (2016). Konflik dan kebijakan publik di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiharjo, H. (2020). Analisis konflik dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 120-135.
- Edwards, M. (2018). Conflict and governance in local government. *Journal of Local Government Studies*, 22(3), 290-305.
- Fitriani, E. (2019). Konflik sosial dan dampaknya terhadap stabilitas politik daerah. *Jurnal Politik Indonesia*, 34(1), 45-60.
- Ginting, D. (2021). Pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap konflik daerah. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Kartika, A., & Widodo, W. (2020). Strategi penyelesaian konflik dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(4), 250-267.
- Kurniawan, S. (2018). Peran komunikasi dalam penyelesaian konflik pemerintahan daerah. *Jurnal Komunikasi Politik*, 19(2), 115-128.
- Lestari, Y., & Susanto, B. (2020). Penyelesaian konflik sosial di pemerintahan daerah melalui pendekatan hukum. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 11(1), 25-41.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2017). Political conflict in local governance: A case study in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 23(3), 189-202.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2018). Research in education: Evidence-based inquiry (8th ed.). Boston: Pearson.
- Mulyani, R., & Iskandar, R. (2019). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 14(3), 197-210.

- Nasution, A. (2020). Pembangunan daerah dan dampak konflik sosial. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 22(2), 130-145.
- Prawira, S., & Tanjung, D. (2018). Konflik politik dan pengaruhnya terhadap stabilitas pemerintahan daerah. *Politika*, 21(1), 99-113.
- Rahardjo, S. (2017). Konflik sosial dan penyelesaian berbasis masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, F., & Fattah, Y. (2021). Governance, conflict, and the local government system. *International Journal of Public Sector Management*, 34(4), 380-396.
- Sari, I. P., & Nugroho, A. (2019). Penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat dalam konteks pemerintahan daerah. *Jurnal Sosial Politik*, 29(2), 73-85.
- Simanjuntak, D., & Susanto, E. (2020). Strategi kebijakan dalam penyelesaian konflik lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 33-47.
- Smith, A. C., & Jones, R. L. (2019). Public administration and conflict resolution in local governance. *Public Administration Review*, 79(5), 710-723.
- Suharto, T. (2021). Kolaborasi antar daerah dalam menangani konflik lintas wilayah. *Jurnal Pemerintahan Terpadu*, 10(4), 312-325.
- Sutrisno, H., & Jaya, P. (2018). Teori dan praktik manajemen konflik dalam pemerintahan daerah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Tarmizi, R. (2020). Pengaruh konflik terhadap pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 13(2), 204-218.
- Wirawan, W. (2019). Pendekatan sosial dalam penyelesaian konflik di pemerintahan daerah. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(3), 190-205.



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 12: SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.

Universitas Pamulang

BAB 12

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi mempunyai sejarah yang panjang dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Fondasi penting dari struktur pemerintahan Indonesia adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Gagasan ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah, seperti desa, untuk mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri. Desa, sebagai unit administratif terkecil, mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Di tengah perubahan zaman, desa harus tetap beradaptasi dan berkembang. Sistem pemerintahan desa yang sukses sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien.

Desa, sebagai komunitas yang memiliki karakteristik unik dan beragam, merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung masyarakat dengan program-program pembangunan. Dengan jumlah desa yang mencapai 83.794 pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023), peran desa menjadi krusial dalam pembangunan nasional, terutama dalam pemerataan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah desa yang besar ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia, serta menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif di tingkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Hal ini membuka peluang bagi desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun, tantangan juga muncul, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTlVtVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 5 No 1(150), 76–82.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Buku Panduan BPD*.
- KM, M. A. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Prespektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Marit, E. L., Revida, E., Zaman, N., Werimon, M. N. S., Rahmadana, M. F., Silalahi, Marto Purba, B., Sutrisno, E., Pardede, A. F., & Yendrianof, D. (2016). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa* (A. Karim & J. Simarmata (eds.)). Yayasan Kita Menulis.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa: Bagian 1 Tinjauan Umum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*, 2(2), 210–229.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. iPusnas.apk
- Rahman Mulyawan. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Unpad Press.
- Rahyunir Rauf, & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa* (Y. Munaf (ed.)). Zanafa PubLisHing.
- Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media.

- Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA.
<https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Soemantri, B. T. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Somali, S. G. (2021). Tata kelola pemerintahan desa village governance. *Tata Kelola Pemerintah Desa Village Governance*, 6, 141–152.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47–56.
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i1.198>
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 13: ETIKA DAN TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si.

Universitas Nusa Cendana

BAB 13

ETIKA DAN TRANSPARANSI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan yang menerapkan otonomi daerah, etika dan transparansi menjadi dua pilar utama yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penyerahan wewenang yang signifikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan internalnya mengharuskan mereka untuk memegang tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan inklusif. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai pedoman moral bagi para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, transparansi menjamin adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga membuka peluang bagi pengawasan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan etika dan transparansi semakin mendapat perhatian dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum, serta urusan pilihan seperti pariwisata dan kelautan, membutuhkan komitmen yang kuat terhadap kedua prinsip ini agar pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan etika dan transparansi di tingkat daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran etis, lemahnya sistem pengawasan, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan ini tidak hanya mendukung tercapainya tata kelola yang baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian,

DAFTAR PUSTAKA

- Bowman, J. S., West, J. P., & Beck, M. A. (2010). *Achieving competencies in public service*. ME Sharpe.
- Dimock, M. E. & Dimock, G. O. (1969). *Public Administration*. Rineka Cipta; Jakarta
- Haryatmoko, J. (2011). *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- KASN, (2018). *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta.
- Kumorotomo, W. (2014). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung
- Nasional, B. P. P., & Negeri, D. D. (2002). *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Ngorang, P. (2020). *Etika Pelayanan Publik Sebuah Pengantar*. Depok: Rajawali Pres
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (2018). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. In *Democracy, bureaucracy, and the study of administration* (pp. 182-204). Routledge.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.
- Seger, M. S. D. (2022). Bureaucratic Accountability In The Management of The Operational Fund School (BOS) (Case Study On Elementary Education Kupang). *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(4), 527-536.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing

- Smith, B. C. (2023). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. Taylor & Francis.
- Syafruddin, A. (2006). Mengarungi Dua Samudra. *Sayagatama, Bandung*.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PROFIL PENULIS

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP.



Penulis adalah seorang dosen dan peneliti di bidang administrasi publik pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Gelar Magister diperoleh dari Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Brawijaya. Demikian pula, gelar doktor juga diperoleh dari Program Studi Doktor Ilmu Administrasi (PSDIA) FIA Universitas Brawijaya. Spesialisasi utamanya sebagai dosen adalah pada bidang ilmu Pemerintahan Daerah. Namun demikian riset yang telah dilakukan selain bidang utama pemerintah daerah juga meliputi bidang kajian kebijakan publik dan keuangan publik.

Suanto, S.Pd., M.H.



Penulis lahir di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Latar belakang Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, S2 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pamulang. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan inshaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum. Melalui buku ini penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan Landasan Hukum Pemerintahan Daerah.

Anny Riwayat, S.E., M.Si.



Penulis lahir di Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tanggal 13 September 1989. Jenjang Pendidikan S1 Akuntansi ditempuh di STIE Bank BPD Jateng, Kota Semarang lulus tahun 2011. Pendidikan S2 Ilmu Administrasi Publik, lulus tahun 2015 di Universitas Diponegoro (UNDIP) Kota Semarang. Saat ini menjadi Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Beliau aktif menulis beberapa buku yang sudah diterbitkan sejak tahun 2022 serta beberapa jurnal yang sudah publish, khususnya di bidang administrasi publik. Selain aktif dalam menulis, beliau juga menjadi editor buku sejak tahun 2023. Sudah ada 4 buku yang sudah diedit dan terbit. Jurnal yang sudah ditulis baik penelitian maupun pengabdian bisa dilihat di <https://www.researchgate.net/profile/Anny-Riwayat>. Selain itu penulis juga bisa dilihat jejak tulisannya di website SINTA <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6831126>. Penulis memiliki motivasi yang tinggi dalam melakukan riset, jadi apabila ada yang minat mengajak kolaborasi, dengan senang hati menerimanya, terutama di bidang administrasi publik. Menulis adalah cara penulis untuk belajar. Seorang pendidik maupun sebagai individu yang masih hidup maka tidak ada kata berhenti dalam belajar. Ilmu tetaplah harus diajarkan dan ditularkan tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk kebermanfaatan banyak orang.

Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si.



Penulis kelahiran Jember. Pada tahun 2006 meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan Pemerintahan Daerah. Penulis saat ini aktif dalam Riset Group "*Institute maritime for studies*" Universitas

Jember dan menjadi Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Selain itu, menjadi pengurus Organisasi Profesi yaitu Indonesian Association Public Administration (IAPA) Jawa Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan beberapa buku referensi yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (2019) dan Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah (2021). Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP.



Penulis dilahirkan di Desa Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 September 1980. Menyelesaikan studi S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2002. Di Tahun 2003, melanjutkan pendidikan S-2 di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan selesai di tahun 2006 dengan memperoleh gelar Master Studi Pembangunan. Sejak tahun 2007, mulai berkarir di dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap perguruan tinggi swasta di Medan yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2012, diamanahkan untuk menjadi pengelola jurnal ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KESKAP) hingga tahun 2016 selanjutnya dipercaya menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional. Tahun 2013, juga dipercayakan untuk menjadi Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2016, melanjutkan studi ke jenjang program doktor di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi dan selesai di tahun 2020. Sejak tahun 2015 juga, bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan menjadi tim pendamping tenaga

ahli di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan beberapa daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli pada Smart ID. Tahun 2016, mengikuti perlombaan karya ilmiah se-nasional yang diadakan forum perguruan tinggi islam se-Indonesia di Universitas Islam Riau Pekanbaru. Sejak menjadi dosen juga memiliki beberapa karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi dan prosiding baik skala nasional dan internasional juga buku referensi, buku monograf, buku chapter (Nasional dan Internasional). Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya yang dilaksanakan adalah sebagai assesor BKD, assesor kompetensi lapangan di bidang Administrasi Publik.

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H.



Penulis merupakan Dosen pada Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) Jember. Studi Filsafat dan Teologi pada STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. Berasal dari Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Penulis telah menerbitkan sejumlah buku penting. Karya-karya penulis meliputi: Supervisi Pendidikan. Penerbit, Dotplus Publisher (2022), Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam pendidikan. Penerbit: Dotplus Publisher (2022), Manajemen Strategik Sektor Publik. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori. Penerbit: CV. Literakata Karya Indonesia (2024), Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022), Eksekusi Laut: berfilsafat tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solutif penghapusan hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), Politik Hukum Pidana, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Hukum Tentang Desa, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Pancasila dalam Pendidikan Tinggi, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024),

Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka, Penerbit: PT. Mifandi Mandiri Digital (2024), dan berkontribusi dalam prosiding seminar nasional serta konferensi Internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat, pendidikan, hukum, manajemen hingga strategi politik.

Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.



Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane Binti La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma Binti La Timbasa (Wa Unga). Istri bernama Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Al-Islam Kemuhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2017 – 2021 dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2017 – 2020. Pendiri dan Pembina Yayasan Bakti Gemini Indonesia 2021 – Sekarang. Ketua DPD PA GMNI Sulawesi Tengah Periode 2021. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024. Bergabung dalam keanggotaan Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI) dan Keanggotaan Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI). Tergabung dalam penulisan buku antologi puisi, Book Chapter dan berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah maupun Pihak swasta. Sebagai Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Penulis dapat dihubungi melalui:

What App : 085395333301
email : putrohade@gmail.com
adeputra@unismuhluwuk.ac.id

Google Scholar : 7JLLxKMAAAAJ
SINTA ID : 6681079
Scopus ID : 57214108932
Web of Science : ABM-9152-2022
Researcher ID
ORCID ID : <https://orcid.org/0000-0002-3749-2382>

Amtai Alaslan, S.IP., M.Si.



Penulis dengan sapaan akrab Bung Allan, Lahir di Latdalam Pada tanggal 18 Juni 1985. Lulus Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari STPMD "APMD" Yogyakarta Tahun 2008. Mendapatkan gelar Master Ilmu Pemerintahan (M.Si) dari Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Almamater yang sama Tahun 2011. Penulis sudah menjadi dosen tetap sejak tahun 2008 hingga sekarang dan saat ini dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) periode 2023-2026. Penulis telah menerbitkan beberapa buku antara lain Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar tahun 2021, Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Buku Metode Penelitian Ilmu Sosial tahun 2022, Kemudian Buku Etika Bisnis, Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi, Manajemen Strategis, Manajemen Sektor Publik, Birokrasi Indonesia, Konsep Penelitian Kualitatif, Analisis Manajemen Strategis, Kebijakan Publik, Kepemimpinan tahun 2023 dan Buku Pengantar Administrasi Publik tahun 2024. Selain itu Penulis juga aktif dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah pada berbagai jurnal nasional yang terakreditasi.

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.



Penulis lahir di Nunukan 17 Desember 1989. Pendidikan Tingginya meliputi S1 Ilmu Hukum di Universitas Mulawarman (2008), S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2013), S3 Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (2019). Kariernya diawali sebagai Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Beberapa Universitas di Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka (UT) Tarakan sebagai Tutor. Selain Akademisi beliau juga seorang Praktisi Hukum di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dr. Mohamad Djasuli, SE.,M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT.



Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi Konsultan dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Keuangan Desa. Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2002 – 2013. Meraih gelar sarjana dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 1994 dan gelar magisternya dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2004, serta Gelar Doktor dari Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Penulis pernah menjadi Ketua Satuan Pengawas Internal dan Ketua LPPM di Universitas Trunojoyo Madura, serta saat ini juga aktif sebagai Pengurus Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), anggota Persatuan Auditor Internal Indonesia (PAII) dan ISEI Madura. Email: mdjasuli@gmail.com.

Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P.



Penulis seorang dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus Merauke. Lahir di Pasarwajo, 19 Februari 1992. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Husein Djaila dan Ibu Wa Saa. Penulis Memiliki Seorang Istri Wa Lina, S.Pd. dan tiga orang anak perempuan; anak pertama Syahira Azzahra Syahrabudin Husen Inali, anak kedua Syahwa Silmi Kaffah Syahrabudin dan anak ketiga Syaquillah Humairah Syahrabudin. Penulis menyelesaikan Pendidikan program Sarjana (S1). Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2015 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Halu Oleo Kendari Program Studi Administrasi Pembangunan pada tahun 2017. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: Administrasi Kepegawaian (2023), Sebuah Pengantar Memahami Ekonomi Politik (2024), Pendidikan Anti Korupsi (2024), Transformasi Kepemimpinan (Membangun Organisasi Melalui Visi, Kompetensi dan Etika (2024) dan Administrasi negara: prinsip dan praktik (2024).

Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.



Penulis lahir di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Januari 1989. Pendidikan sarjana penulis ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2014. Pada tahun 2024 penulis berhasil menyelesaikan studi doctor pada Program Pascasarjana Universitas Pakuan dan memperoleh gelar doctor dalam bidang Manajemen Pendidikan pada. Saat ini peneliti aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Pamulang sejak tahun 2014 dan diberi amanah sebagai Ketua Program

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Pengalaman berorganisasi antara lain menjadi sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni) Wilayah Banten Tahun 2021 - sekarang, sebagai sekretaris Asosiasi Kelembagaan Dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum Seluruh Indonesia (Perwakilan Wilayah LLDIKTI IV) tahun 2024-2027.

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si.



Penulis adalah seorang akademisi yang mendalami Ilmu Administrasi Negara dengan latar belakang pendidikan di Universitas Nusa Cendana, baik pada jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2). Selama masa studinya, ia berfokus pada bidang-bidang utama dalam Administrasi Negara, termasuk Teori Administrasi Pembangunan, Manajemen Publik, Serta Organisasi Dan Manajemen. Saat ini, Marini berprofesi sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana. Sebagai dosen, ia tidak hanya mengemban tugas pengajaran, juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Administrasi Publik. Melalui tulisan ini, ia berupaya mengidentifikasi solusi inovatif bagi permasalahan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pengalaman dan dedikasi yang tinggi, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan diri sebagai akademisi dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan generasi baru administrator publik yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era yang semakin kompleks ini.

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini membahas berbagai aspek penting yang mencakup landasan hukum, struktur organisasi, konsep otonomi, pengelolaan keuangan, serta perencanaan pembangunan daerah.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta memastikan pengawasan dan akuntabilitas yang transparan. Buku ini juga mengulas dinamika pemerintahan daerah, termasuk tantangan dalam pengelolaan konflik dan penerapan etika dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya peran pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan daerah, yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan dilengkapi analisis praktis dan wawasan teoritis, buku ini memberikan panduan yang relevan bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang tata kelola pemerintahan daerah dan perannya dalam pembangunan bangsa. Dirancang untuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

 0815-7000-699

PEMERINTAHAN - Rp. 87.100

ISBN 978-623-500-812-7



9

786235

008127